



## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### ***Factors Affecting the Quality of the Provincial Government Financial Report South Sulawesi***

**Nurafni Baturante,**

Dinas Perumahan, Pemukiman & Pertahanan Prov. Sul-sel

Email : [Nurafni9@gmail.com](mailto:Nurafni9@gmail.com)

**Jeni Kamase,**

Universitas Muslim Indonesia

Email : [Jeni\\_kamase@umi.ac.id](mailto:Jeni_kamase@umi.ac.id)

**Fadliah Nasaruddin**

Universitas Muslim Indonesia

Email : [Fadilah@umi.ac.id](mailto:Fadilah@umi.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*The objectives of this study are to determine and obtain empirical evidence related the effect of human resource competence, the application of Government Accounting Standard, the application of Government Internal Control System, the utilization of technology, the review of financial report and bureaucratic culture on the quality of financial report in Government of South Sulawesi. This research was conducted on entire financial administration entity accounting official local government unit (OPD) of Government of South Sulawesi, using primary data obtained from questionnaires distributed to respondent. Analysis of data using regression analysis linear multiple by SPSS Program. Partial test result show*

*competence of human resources and the utilization of information technology have a significant positive effect on the quality of quality of financial report, while the application of SPIP, the application of SAP, the review of the Financial Statements and Bureaucratic Culture has no effect on the quality quality of financial report.*

**Keywords:** *Competence, implementation of SPIP and SAP, information technology, financial report review, bureaucratic culture and quality of financial report*

## PENDAHULUAN

Pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien dan responsif sebagaimana amanat Undang-Undang dan memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas sektor publik melalui *good government governance*. Salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip *good government governance* adalah meningkatkan akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:3). Media pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. laporan keuangan yang berkualitas akan mengikis ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan banyaknya aparat pemerintah yang tersandung kasus korupsi.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD (PP Nomor 71 Tahun 2010) yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD di Indonesia (Kawedar, 2010). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna (Zeyn, 2011)

Pengendalian intern merupakan aspek penting dalam sistem akuntansi untuk menyakinkan keakuratan laporan keuangan yang disajikan berkualitas. Dimana komponen pengendalian intern dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian internal akan tercapai (Arens *et al.*, 2012:320). Pengendalian internal ini dibangun dari lima komponen sebagai berikut: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) aktivitas pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; serta (e) monitoring (PP Nomor 60 tahun 2008; Bodnar dan Hoopwod, 2010; Aren *et al.*, 2012:298).

SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas selaku objek yang menerapkan SPIP dan SAP Simanjuntak (2005:72). Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang yang terdiri dari potensi pendidikan,

pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014) dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku (Irwan, 2011) SDM yang bersangkutan.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas telah dibuktikan oleh Karmila (2013) dan Indriasih (2014) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBD/N) yang menunjukkan volume dan kuantitas transaksi yang semakin rumit dan kompleks sehingga dibutuhkan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008. tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk optimalisasi peran pengawasan intern melalui review laporan keuangan. serta menyampaikan LKPD yang disusun dengan mengikuti SAP yang telah diterima secara umum (Kawedar, 2010).

Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran dan diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan (Maschab, 1991:266) sehingga perbaikan dalam budaya birokrasi harus disesuaikan dengan paradigma baru yakni sumber daya manusia yang profesional yang dapat diukur dari kemampuan, loyalitas dan konsistensi (Siagian 1995), dan ini sejalan dengan penelitian Yohanis Ali (2014) yang menyatakan budaya birokrasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan fenomena tersebut, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, review atas laporan keuangan dan budaya birokrasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu sematamata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi

keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Irwan, 2011).

#### **b. Teori Harapan**

*Expectancy theory* dikemukakan oleh Victor H. Vroom (1964) dalam Hendry (2010), yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Vroom mengintegrasikan konsep-konsep kekuatan atau kemampuan motivasi menjadi model yang dapat diprediksi yaitu harapan (*expectancy*), nilai (*valence*), dan pertautan (*instrumentality*).

#### **c. Teori Atribusi**

Menurut Fritz Heider (1958) dalam hedayati (2002) perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya kesulitan tugas. Berdasarkan hal tersebut, seseorang termotivasi untuk memahami lingkungan dan sebab-sebab terjadinya sesuatu. Teori ini diterapkan dengan mempergunakan variabel *locus of control* yang terdiri atas dua komponen yaitu *internal locus of control* dan *external locus of control*.

#### **d. Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni 1) Relevan, 2) Andal, 3) dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

#### **e. Kompetensi SDM**

Kompetensi menurut oyatzis (1982:96) merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam bidang karir tertentu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas atau fungsi sesuai keahliannya. Jing (1998) mendefinisikan kompetensi dalam akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan bagi seseorang untuk bekerja sebagai seorang akuntan. Pendapat ini sejalan dengan pasal 1 ayat 10 25 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan.

#### **f. Budaya Birokrasi**

Penerapan sistem politik *sentralistik* dan *hegemonik*, negara cenderung telah mengembangkan model kebijakan dan sistem birokrasi pemerintahan yang mengarah pada penyeragaman di hampir semua aspek kebijakan. Reformasi

birokrasi juga bias dimaknai sebagai upaya-upaya strategis dalam menata kembali birokrasi yang sedang berjalan sesuai prinsip-prinsip birokrasi menurut Max Webber dalam Panji (2008), yaitu *span of control, division of labor, line and staff, rule and regulation and professional staff*. Seperti yang diungkap dalam teori Max weber bahwa untuk mencapai tujuan suatu organisasi harus memiliki struktur ideal yang disebut dengan birokrasi.

#### **g. Teknologi Informasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Proses pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Laporan Keuangan, Peranan SIPKD adalah melakukan pemrosesan dan pengelolaan hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan pada masing-masing instansi terkait dengan efektif dan efisien.

#### **h. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

PP No 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa SPIP adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Unsur-unsur SPIP menurut PP No 60 Tahun 2008, mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan pada lingkungan pemerintahan di berbagai negara, meliputi: 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian risiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi dan 5) Pemantauan

#### **i. Review Laporan Keuangan**

Menurut (SPAP : 2001) Review adalah Pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan dalam rangka pernyataan tanggung jawab (*statement of responsibility*) atas laporan keuangan tersebut.

Dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 di atur bahwa inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan rewiuw atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka memberi keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

## J. Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP 71 Tahun 2010

SAP mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Pengembangan

Laporan keuangan pokok pemerintah daerah menurut PP Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari: (a) laporan realisasi anggaran (LRA); (b) neraca; (c) laporan arus kas (LAK) dan (d) catatan atas laporan keuangan (CaLK). Penyajian laporan kinerja dan laporan perubahan ekuitas diperkenankan untuk disajikan selain laporan keuangan pokok pemerintah daerah. Penjelasan PP Nomor 71 tahun 2010 memuat pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan melakukan survei dengan menggunakan metode deskripsi dan eksploratori untuk membahas tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAP, penerapan SPIP, pemanfaatan teknologi informasi, review laporan keuangan, dan budaya birokrasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh PA/KPA, PPK-OPD, Bendahara dan staf Pengelola Keuangan dengan menggunakan teknik *purpose sampling* dengan kriteria objek penelitian adalah personel yang terkait langsung dengan proses transaksi keuangan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan dan telah melaksanakan tugas tersebut minimal satu tahun atau lebih.

## HASIL & PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan  $3,112 t\text{-hitung} > t\text{-tabel } 1,983$  yang berarti Indikator yang membentuk kompetensi SDM yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan etika sumber daya manusia pada entitas akuntansi dapat dikategorikan baik, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Xu *et al.* (2003), As Syifa Nurillah (2014) yang menemukan bahwa sumber daya manusia memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, akan menghasilkan kualitas informasi akuntansi yang baik. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Indriasih (2014) dan Sudiarianti dan Alupui (2015), Irwan dan Dedi (2011).

Hipotesis kedua menunjukkan nilai  $t\text{-tabel}$  atau  $-1,174 < t\text{-tabel } 1,983$  yang menolak hipotesis yang menyatakan penerapan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Karmila, Amries Rusli, Edfan Darlis (2013) yang meneliti pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan

keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, dengan hasil sistem pengendalian intern yang diprosikan dengan integritas data, ketepatan input, prosedur otorisasi, penyimpanan dokumen sumber data, pemberian wewenang, penentuan kebijakan dan standar akuntansi, pelaksanaan kebijakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi LKPD serta sejalan dengan temuan Suwanda (2015).

Hipotesis ketiga menunjukkan nilai t-tabel atau t-hitung  $0,360 < t\text{-tabel } 1,983$  yang menolak hipotesis yang menyatakan penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan SAP dan kualitas LKPD berpengaruh positif tidak signifikan Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fikri *et al.* (2015) yang meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan penelitian penerapan standar akuntansi pemerintahan dikembangkan dari PP No. 24 Tahun 2005. Serta sejalan dengan temuan Susilawati (2014).

Hipotesis keempat menunjukkan nilai t-hitung  $3,678 > t\text{-tabel } 1,983$  yang berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Indriasih (2014) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBD/N) yang menunjukkan volume dan kuantitas transaksi yang semakin rumit dan kompleks. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Winidyaningrum (2010); temuan Karmila (2013) dan temuan Merlyn C.T. Kalumata, Ventje Ilat, Jessy D.L. Warongan (2015).

Hipotesis kelima menunjukkan nilai t-tabel atau t-hitung  $1,696 < t\text{-tabel } 1,983$  yang menolak hipotesis yang menyatakan review atas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Syarifudin (2014) yang menemukan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, dimana dikemukakan bahwa audit intern tidak mengerjakan secara langsung dalam proses penyusunan dan penyajian LKPD. Tugas utama Audit Intern adalah melakukan pemeriksaan, pembinaan terhadap proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dan sebagai konsultan manajemen. Keterbatasan jumlah aparat Inspektorat, tingkat kompetensi dan luasnya cakupan pemeriksaan masih menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan mendetail, sehingga kinerja audit intern menjadi kurang optimal. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Fikri *et al.* (2015).

Hipotesis keenam menunjukkan nilai t-hitung  $-0,423 < t\text{-tabel } 1,983$  yang menolak hipotesis yang menyatakan budaya birokrasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobirin (2008), yang menemukan bahwa selama ini penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja, tetapi hanya berbasis pada kepatuhan semata. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Akan tetapi tidak sejalan dengan temuan Yohanis Ali (2014) yang menemukan bahwa budaya birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pegawai negeri sipil pada Badan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Dengan hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa secara simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan SPIP, penerapan SAP, pemanfaatan TI, review atas laporan keuangan dan budaya birokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sedang secara parsial pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi penelitian yang akan datang, untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya secara rutin mengadakan diklat penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi atas peraturan yang berkaitan keuangan mengingat latar belakang pendidikan personil yang ditempatkan pada entitas akuntansi yang beragam dan sebagian besar non ekonomi. Terkait dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,312 yang mengindikasikan bahwa terdapat 68,8% variabel kualitas LKPD dapat dijelaskan variabel lain diluar model. Hal ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah seperti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi serta pengalaman kerja SDM.

## REFERENSI

- Alex S. Nitisemito. 2000. *Manajemen Personalia: Manajemen Sumber Daya Manusia, Ed. 3*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Arens, A.A, Randal J, dan Beasley, M.S. 2008. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*. PT Indeks IKAPI, Jakarta.
- Arikunto, S. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Badan Kepegawaian Negara. 2003. *Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara*

*Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.*

\_\_\_\_\_. 2011. *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.*

Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga.

Biana M. Fikri, Adha Inapty dan Sri Panca Martiningsih. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi* Vol. 9

Bodnar, H.G. dan Hopwood, W.S. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi.* Buku I. Edisi Ke-6. Penerjemah Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan. Jakarta: Salemba Empat.

Budiaji, W. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan 2013.* ISSN 2302-6308

Choirunisah, F. 2008. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi. *Jurnal.* Universitas Gajahmada

Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations,* New York: Wiley.

Hidayati, A, 2000, Pengaruh Aspek-Aspek Penganggaran Terhadap Konflik Peran, Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi, Simposium Nasional Akuntansi IV

Hullah, AR, Sifrid Pangemanan, Steven Tangkuman dan Novi Budiarmo. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* Vol. 3

Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting.* Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847

Irwan, D. 2011. “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat”. Universitas Gajahmada.

Jensen C.M. dan Meckling H.W. 1976. *Theory of the firm : Manajerial behavior*

agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economic*.

Kawedar, W. 2010. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ yang Mengalami Penurunan Opini Audit). *Jurnal*. Universitas Diponegoro.

Karmila, Amries Rusdi dan Edfan Darlis, 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sorot* Vo. 9 No. 1

\_\_\_\_\_. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Lane, J.E. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.

Lupia, A. dan McCubbins, M. 2000. Representatif or abdication? How citizen use institution to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.

Ma'arif, M.S, dan Tanjung, H. 2003. *Manajemen Operasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Maschab Mashury,1991. *Budaya Birokrasi Pemerintah Indonesia*. Jakarta: PT. Utama Grafiti

Mardiasmo.2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mathis, R. dan Jackson, J. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Buku 2, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.

Muins D. 2000. *True Professionalism*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-3, Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan, *Makalah dalam Seminar Nasional tentang “Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat dan Daerah; h.1.* ([www.ksap.org](http://www.ksap.org)) [12/09/2014].

Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_ 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- \_\_\_\_\_ 2006. *Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rivai, V. dan Sagala, E.J. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Rajarafindo Persada.
- Robbins, S.P. dan Judge, T.A. 2008. *Organizational Behaviour. 12 th Edition*. Jakarta : Salemba Empat
- Sani, A. (2017). *Sistem Manajemen Otomasi Perpustakaan Berbasis Open Source Senayan Library Management System (SLiMS)(Studi Kasus Perpustakaan H. Bata Ilyas STIE AMKOP Makassar)*. SEIKO: Journal of Management & Business, 1(1), 47-65.
- Sedarmayati, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Simajuntak, B.H. 2007. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan*. (www.ksap.org) [13/09/2014].
- Sudiarti Ni Made, I Gusti Agung Alupui dan I. G. Budiasih, 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Suwanda Dadang, 2015. *Factors Affecting Quality of Local Government Financial and Accounting*. ISSN 222.1097 Vol. 6
- Schuler, R.S. dan Jakson S.E. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Menghadapi Abad Ke 21*. Jakarta: Erlangga.